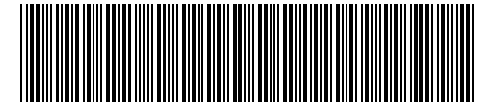




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.408823/2024**



DS:4903-0440-0095-8478

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
  2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
  3. Provinsi : (12) LAMPUNG
  4. Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
- Sebesar : Rp. 752.245.000 ( TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum  
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

		Jumlah Uang
Rp.		752.245.000
Rp.		752.245.000

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	752.245.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN BANDAR LAMPUNG (017) Rp. 752.245.000

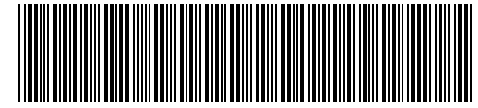
**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



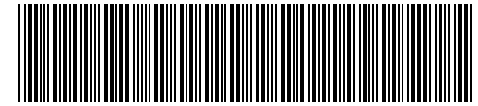
DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : (12) LAMPUNG  
Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	752.245.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	752.245.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (12) LAMPUNG  
Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
23. 04	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
24. 04	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
25. 04	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
26. 05	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
27. 05	Persentase tahanan/harapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
28. 06	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
29. 06	Persentase tahanan/harapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
30. 07	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
31. 07	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
32. 08	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output 1	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	92,00	orang	187.510.000	
Rincian Output	:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasyarakatan di Wilayah	92.00	orang	187.510.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	23,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	431.175.000	
Rincian Output	:	01	BDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan UPT Pemasyarakatan	23.00	Unit Kerja	431.175.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	133.560.000	
Rincian Output	:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	133.560.000

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

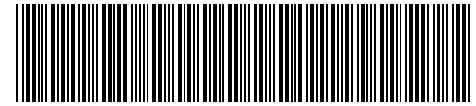
ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

**TAHUN ANGGARAN 2024**

**NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024**

**I B. SUMBER DANA**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
 Provinsi : (12) LAMPUNG  
 Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG

		Rp.	752.245.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Anggaran Tahun 2024					(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni		Rp.	752.245.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB		Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri		Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung		Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
6. SBSN PBS		Rp.	0		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :									(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (12) LAMPUNG  
Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG  
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408823	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	-	752.245	-	-	-	752.245		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	752.245	-	-	-	752.245		
5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	752.245	-	-	-	752.245		
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	187.510	-	-	-	187.510	12 . 51	
01	RM	-	187.510	-	-	-	187.510	017	
5252.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	431.175	-	-	-	431.175	12 . 51	
01	RM	-	431.175	-	-	-	431.175	017	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (12.51 LAMPUNG / KOTA BANDAR LAMPUNG)	-	133.560	-	-	-	133.560	12 . 51	
01	RM	-	133.560	-	-	-	133.560	017	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>752.245</b>	-	-	-	<b>752.245</b>		

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan  
Provinsi : (12) LAMPUNG  
Kode>Nama Satker : (408823) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

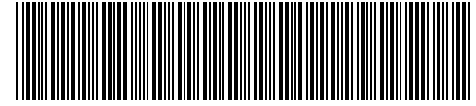
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	408823	<b>KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG</b>														
		<b>RENCANA PENARIKAN DANA</b>	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	63.018	752.245
		<b>BELANJA BARANG</b>	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	63.018	752.245
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	63.018	752.245
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	62.657	63.018	752.245

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
IV A. B L O K I R**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [12] LAMPUNG  
Kode dan Nama Satker : [408823] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.A. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
NOMOR : DIPA- 013.05.2.408823/2024  
IV B. C A T A T A N**



DS:4903-0440-0095-8478

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan  
Provinsi : [12] LAMPUNG  
Kode dan Nama Satker : [408823] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023  
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.  
Reynhard Silitonga  
NIP. 67090332